

## **PGRI KONGRES MELAWAN PGRI NONVAKSENTRAL TAHUN 1962-1967.**

### **CONGRESS PGRI AGAINST NONVAKSENTRAL PGRI IN 1962-1967**

Oleh: Bayu Nursidik, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [mysterymen92@gmail.com](mailto:mysterymen92@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) lahir sebagai wadah perjuangan kaum guru untuk turut serta menegakkan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memandang perbedaan status, agama, maupun ijazah. PGRI sempat terpecah menjadi dua kubu, pertama kubu PGRI Kongres yang setia pada Pancasila, dan kedua kubu PGRI Nonvaksentral yang berpegang pada Panca Tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui awal berdirinya PGRI, dan penyebab terpecahnya PGRI menjadi dua kubu hingga bagaimana akhirnya PGRI bisa menjadi satu organisasi kembali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PGRI berdiri atas inisiatif para tokoh guru yang ingin menyatukan seluruh guru Indonesia di bawah satu naungan organisasi. Pada tahun 1962, terdapat campur tangan tokoh PKI yang menyebabkan PGRI terpecah belah menjadi dua kubu. Permasalahan utama yang terjadi adalah mengenai penggantian dasar pendidikan dari Pancasila ke Panca Cinta. Pada mulanya PGRI Kongres kesulitan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena PGRI Nonvaksentral berhasil menyusup ke dalam pemerintahan Soekarno. Meletusnya peristiwa G 30 S PKI menjadi titik balik bagi PGRI Kongres. PGRI Kongres yang membentuk Kesatuan Aksi Guru (KAGI) dan mendapat kekuatan militer menggunakan dalih pembersihan PKI sebagai dampak peristiwa G 30 S PKI untuk melakukan pemberantasan para anggota PGRI Nonvaksentral. Hingga akhirnya PGRI Kongres berhasil menyatukan kembali PGRI setelah terjadi pertumpahan darah.

Kata Kunci: *PGRI Kongres, Nonvaksentral, Tahun 1962*

#### **ABSTRACT**

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) was born as a result of the teachers' struggles to uphold and defend sovereignty Negara Kesatuan Republik Indonesia without looking at status difference, religion, as well as diploma. PGRI once got splitted to two group, the first group was PGRI Kongres who loyal to Pancasila, and the second group was PGRI Nonvaksentral who loyal to Panca Tinggi. The objective of this research is to determine the establishment of PGRI, and the cause of disunity PGRI became two group up to how PGRI became one organization again in the end.

The result of this research showed that PGRI created as the initiative of teacher figures who want to unite all Indonesian teacher under one organization. In 1962, there was interference by PKI figure which caused PGRI to split into two groups. The main problem that occurs is regarding the replacement of education base from Pancasila to Panca Cinta. At first PGRI Kongres had difficulty in maintaining Pancasila as the basis of education because PGRI Nonvaksentral received support from Soekarno government. The occurrence of the G 30 S PKI became a turning point for the PGRI Kongres. PGRI Kongres formed Kesatuan Aksi Guru (KAGI) and gained military power used the alibi of cleansing up the PKI as a result of G 30 S PKI events to eradicate PGRI Nonvaksentral members. Until PGRI Kongres finally succeeded in reuniting PGRI once again after a bloodbath.

Keywords: *PGRI Kongres, Nonvaksentral, Tahun 1962*

## PENDAHULUAN

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berdiri pada 25 November 1945 untuk menyatukan kaum guru agar bisa berjuang bersama dalam satu wadah organisasi. Pendirian PGRI dapat dilihat dari adanya kesadaran nasional mengenai pentingnya pendidikan. Cikal bakal PGRI sudah ada semenjak berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912. Pendirian PGHB tidak bisa lepas dari peran organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 dan dipelopori oleh dr. Sutomo, Wahidin Soedirohoesodo, dan dr. Cipto Mangunkusumo, meskipun organisasi Budi Utomo bukan organisasi pendidikan namun organisasi ini memiliki semangat perjuangan melalui ideologi pendidikan untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia selama dijajah Belanda.

Hal ini direalisasikan oleh Dwidjosewojo selaku Pengurus Besar Budi Utomo setelah mendapat keluhan dari kaum guru yang merasa terjadi ketidakadilan. Kaum guru merasa bahwa terjadi ketidaksetaraan antara guru pribumi dengan guru bangsa Eropa, hal ini ditanggapi oleh Dwidjosewojo dengan membuat Persatuan Guru Hindia Belanda sebagai wadah bagi kaum guru untuk memperjuangkan suaranya.<sup>1</sup>

Persatuan Guru Hindia Belanda bertahan hingga tahun 1932 dan berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) setelah adanya peraturan pemerintah mengenai sarakat pekerja pegawai negeri. Saat Belanda tunduk

terhadap Jepang, kebanyakan sekolah diambil alih oleh Jepang dan segala bentuk organisasi dilarang termasuk organisasi tentang guru. Hal ini membuat pergerakan organisasi guru menjadi terhenti.<sup>2</sup>

Perjuangan organisasi guru kembali hadir setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, diadakan Kongres Pendidik Bangsa yang dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) di Surakarta, Jawa Tengah yang digerakkan oleh para tokoh pendidik guru yang berhasil melahirkan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).<sup>3</sup>

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang semula berada di Surakarta kemudian dipindah ke Yogyakarta untuk tujuan lebih mempermudah PB PGRI dalam membuka cabang-cabang awal di Yogyakarta. Kegiatan PGRI mulai tahun 1949 mulai mengalami peningkatan di pusat (Yogyakarta) maupun di daerah-daerah luar Yogyakarta.<sup>4</sup> Persatuan Guru Republik Indonesia mulai menghadapi permasalahan yang pelik setelah diadakannya Kongres PGRI VIII dimana terjadi kecurangan dalam pemilihan ketua umum PGRI karena pihak Soebandri dkk menambah kartu pemilihan palsu yang mengakibatkan pemilihan harus diulang kembali.

Permasalahan ini berlanjut pada tahun 1962-1965 di mana terjadi perpecahan dalam tubuh organisasi PGRI. hal ini dikarenakan perbedaan

---

<sup>1</sup> PB PGRI, *Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 56.

<sup>2</sup> Yunus, *PGRI dari masa ke masa*, (Jakarta: PGRI YPLP, 2003), hlm. 6.

<sup>3</sup> PGRI, *Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI*, (Jakarta : PGRI YPLP, 2008), hlm. 39.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 45

pendapat antara para pengurus PGRI dalam menentukan arah pendidikan Indonesia. PGRI yang disokong pemerintahan mengusulkan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Pancatinggi, sedangkan PGRI yang anti PKI tetap bertahan dengan pendidikan yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup>

Guru-guru yang didukung oleh PKI melakukan eksodus besar-besaran dan secara terang-terangan membentuk PGRI Nonvaksentral untuk menandingi PGRI Kongres pada tahun 1964. PGRI Nonvaksentral yang memiliki sokongan dari partai politik dan pemerintah membuat PGRI Kongres khawatir kalah dari PGRI Nonvaksentral. Puncak perseteruan terjadi pasca peristiwa G30S/PKI, PGRI Kongres membentuk Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) yang bertujuan untuk membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari PKI dan PGRI Nonvaksentral.<sup>6</sup> PGRI Kongres yang memiliki dukungan dari militer berhasil menang terhadap PGRI Nonvaksentral. PGRI akhirnya menjadi satu kembali setelah PGRI Nonvaksentral sudah tidak tersisa.

Dari uraian diatas penulis akan membahas mengenai awal berdirinya organisasi PGRI, hingga perpecahan yang terjadi dalam organisasi PGRI pada tahun 1962-1965, dan perlawanan PGRI Kongres terhadap PGRI Nonvaksentral.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan sumber sejarah yang relevan. Sumber tersebut diperoleh dari arsip Perpustakaan Nasional, Arsip

Nasional Republik Indonesia, dan Monumen Pers Nasional, wawancara terhadap saksi hidup kejadian. Tahap kedua yaitu krtitik sumber, merupakan proses pengujian sumber untuk memperoleh kredibilitas dan otentisitas ditinjau dari fisik maupun isi sumber. Tahap ketiga yaitu interpretasi, merupakan proses penafsiran fakta sejarah yang telah diperoleh dari proses kritik sumber. Tahap keempat, historiografi atau penulisan sejarah, yaitu penyampaian tulisan dalam bentuk karya sejarah.

## HASIL PENELITIAN

### A. Awal Berdirinya Organisasi PGRI

Cikal bakal berdirinya organisasi PGRI bisa dilihat dari adanya kesadaran tentang pentingnya pendidikan pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1911 Dwidjosewojo yang merupakan Pengurus Besar organisasi Budi Utomo memprakarsai pendirian organisasi PGHB setelah mendapat keluhan dari para guru bumiputera. Guru bumiputera merasa terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara guru bumiputera dengan guru bangsa Eropa, terutama masalah mengenai perbedaan gaji.

Berdasarkan keputusan *Departement van Onderwijs en Eredienst* ditetapkan bahwa lulusan Guru Sekolah Desa diberikan gaji awal sebesar f. 7,50 per bulan dengan minimal penghasilan f. 15, dan maksimal f. 20-25. Hal ini dikarenakan guru lulusan Guru Sekolah Desa bukanlah pegawai pemerintah, dan apabila terjadi kekurangan maka untuk menutupinya dapat diambil dari kas desa. Apabila kas desa tetap tidak mampu

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 130

membayar dengan uang, maka dapat diganti dengan tanah bengkok guru desa yang berupa tanah garapan atau tanah sawah dengan luas tertentu.<sup>7</sup> Lulusan Kursus Guru Bantu yang merupakan guru-guru bantu di Sekolah Kelas Dua menerima gaji sebesar f. 20-30 per bulan. Lulusan *Normaalschool* yang melahirkan guru sekolah dua mendapat gaji sebesar f.30-45 per bulan. Lulusan *Kweekschool* mendapat gaji sebesar f. 75-150 per bulan, dan biasanya untuk lulusan *Kweekschool* akan ditempatkan sebagai Kepala Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu atau guru Sekolah Kelas Satu. Lulusan *Kweekschool* mendapat gaji yang jauh berbeda daripada guru-guru Sekolah Desa, Guru Bantu Dua dan *Normaalschool* karena kemampuan bahasa Belanda yang bagus dan kecakapan dalam mengajar serta pendidikan yang lebih tinggi dibanding beberapa sekolah tersebut.

Penghasilan gaji tertinggi diperoleh bagi lulusan *Hogere Kweekschool* (HKS) atau *Hollands Inlands Kweekschool* (HIK) yaitu sebesar f. 70-250 per bulan, sedangkan untuk lulusan *Europese Kweekschool* mendapat gaji sebesar f. 125 per bulan. Terakhir untuk lulusan *Hoofdacte* menerima gaji sebesar f. 130 per bulan.<sup>8</sup> Organisasi PGHB bersifat Unitaristik yang berarti, tidak memandang perbedaan ijazah, kedudukan, tempat kerja, suku, golongan,

agama, dan latar belakang seseorang. Kongres pertama PGHB diadakan di Magelang pada tanggal 12 Februari 1912 berhasil membentuk *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij P.G.H.B.* (O.L. Mij. PGHB) yang merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional pertama di Indonesia atas saran dari Dwidjosewojo.<sup>9</sup>

Pembentukan *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij P.G.H.B.* ini sebagai upaya untuk memakmurkan para guru-guru bumiputera. PGHB memiliki suatu bidang usaha yang dapat dijalankan oleh seluruh anggota PGHB dan sebagai sokongan dana bagi perkembangan PGHB ke depannya. Pada tahun 1919 tepat setelah 7 tahun PGHB berdiri terjadi perpecahan,<sup>10</sup> bukan berarti para guru keluar dari PGHB namun lebih kepada guru-guru yang berjuang secara terpisah hanya untuk golongannya sendiri.<sup>11</sup>

Pada tahun 1932 PGHB memutuskan untuk mengubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) akibat peraturan mengenai sarakat sekerja pegawai negeri yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal pendirian PGI, PGI sudah memiliki 15 ribu orang anggota yang tersebar diseluruh Indonesia dengan anggota terbanyak dari VOB atau Perserikatan

<sup>7</sup> Yunus, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Simbol f. merupakan lambang mata uang yang digunakan selama masa pemerintahan Hindia Belanda, disebut juga dengan Gulden. Lihat Depdikbud, *Ibid.*, hlm. 72

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>10</sup> O.L. Mij PGHB melepaskan diri dari PGHB yang membuat PGHB kekurangan sokongan dana untuk

memperjuangkan nasib anggotanya. Sehingga beberapa anggota PGHB memisahkan diri dan membentuk organisasi-organisasi baru. Lihat PB. PGRI, *op.cit.*, hlm 16

<sup>11</sup> Rusli Yunus, M. *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003*, (Jakarta: PB. PGRI, 2003), hal. 39-40

Guru Desa yang memiliki 103 cabang dan 9 ribu anggota.<sup>12</sup>

Bertepatan dengan dua puluh lima tahun berdirinya PGI (dilihat dari pendirian awal PGHB), PGI mengadakan Kongres di Bandung pada bulan November 1937. Dalam kongres ini pembahasan utamanya tentang diadakannya wajib belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia agar semua masyarakat Indonesia bisa merasakan pendidikan yang layak. Kemudian Pada tahun 1938 PGI mengadakan Kongres di Malang, kongres kali ini menuntut agar pemerintah selain melimpahkan urusan pengajaran ke tangan pemerintah daerah namun juga harus disertai perbaikan keuangan daerah. PGI menuntut perbaikan gaji bagi para guru karena selama ini dirasa masih kurang untuk memakmurkan para kaum guru.

Pergerakan PGI berhenti ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang kebanyakan sekolah diambil alih oleh Jepang dan segala bentuk organisasi dilarang termasuk organisasi tentang guru.<sup>13</sup> Perjuangan kaum guru mulai hidup kembali setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Disaat semangat revolusi sedang memuncak, kaum guru merasa memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban akan pengabdianya serta partisipasinya kepada perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan NKRI. Tokoh – tokoh perintis seperti Moch Hoesodo, Rh Koesnan, Siswowardojo, dan Baroya menyadari

peluang untuk menyalurkan perjuangan penyadaran nasional melalui sebuah wadah organisasi profesi baru.

Seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, akan diadakan Kongres Pendidik Bangsa yang dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) di Surakarta, Jawa Tengah. Mereka berempat mengetahui hal tersebut dan memiliki inisiatif untuk membentuk sebuah wadah organisasi guru yang lebih besar. Pada permulaan bulan Oktober 1945, Rh Koesnan selaku Kepala Sekolah SGP mengundang beberapa tokoh guru seperti Baroya, Moch Hoesodo, Siswowardojo, Amin Singgih, dll.<sup>14</sup> Rh Koesnan mengajak para hadirin untuk membentuk suatu persatuan guru yang akan mempersatukan semua guru tanpa memandang perbedaan latar belakang pendidikan ataupun agama sehingga tidak akan terulang kembali perpecahan yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda.<sup>15</sup> Ide tersebut disetujui oleh seluruh tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk merealisasikannya, mereka mengajak semua guru yang berada di wilayah Republik Indonesia untuk mengikuti Kongres Pendidik Bangsa. Ajakan mengikuti kongres dikirim melalui surat ke seluruh wilayah Indonesia dan melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Kongres yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 24 November hingga 25 November menghasilkan keputusan yang melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).<sup>16</sup> Nama PGRI sendiri diusulkan oleh Persatuan Guru Seluruh Perangan dari

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>13</sup> Hadiatmadja, R.A. Soepardi, dkk., *Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSPPGRI), Jilid II, III, IV, V*, (Semarang: IKIP PGRI, 2000), hlm. 13

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 79

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 60

<sup>16</sup> Yunus, *op. cit.*, hlm. 42-44

Jawa Barat, sejak saat itu tanggal 25 November 1945 dijadikan sebagai peringatan lahirnya organisasi PGRI sebagai wadah perjuangan kaum guru untuk turut serta menegakkan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Kongres Pendidik Bangsa dijadikan PGRI sebagai Kongres I PGRI dengan bahasan utama mengenai pemrotesan terhadap negara-negara yang mengirimkan tentara pasukan ke Indonesia. PGRI menganggap bahwa Indonesia sudah memiliki tentara keamanan sendiri sehingga sekutu dan negara-negara lain yang memiliki tentara di Indonesia diharapkan ditarik kembali seperti AFNEI dan NICA. Kongres pertama PGRI memutuskan Amin Singgih sebagai ketua PB PGRI, Rh. Koesnan dan Soekitro sebagai wakil ketua PB PGRI. Lahirnya PGRI telah berhasil menghapus perpecahan yang terjadi antar kelompok guru yang diakibatkan oleh perbedaan ijazah, lingkungan pekerjaan dan lingkungan daerah, perbedaan agama, suku, maupun aliran politik sehingga para guru bisa berjuang bersama dalam satu wadah untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Selanjutnya PGRI mengadakan Kongres-kongres untuk kelangsungan organisasi PGRI dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

## B. Perpecahan Organisasi PGRI

Pada Kongres VII PGRI pengaruh Komunisme mulai masuk

dalam tubuh PGRI, ditandai dengan terpilihnya Soebandri sebagai redaksi suara majalah guru pada tahun 1952.<sup>18</sup> Pengaruh PKI pada saat ini masih belum terlalu terasa dikarenakan masih dalam skala kecil dan belum bisa memecah suara anggota PB PGRI. Jumlah anggota PGRI sendiri yang mendukung terhadap PKI di Jawa Barat hanya berkisar 573 orang dari 80.000 anggota. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah anggota lebih dari 2000 orang yang mendukung PKI.<sup>19</sup> Pada Kongres VII PGRI Hermanoe Adi yang merupakan tokoh PKI dari Jawa Timur berhasil terpilih menjadi Wakil Ketua II PB PGRI, kesempatan ini dimanfaatkan untuk merekrut anggota-anggota PKI, terutama yang berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk masuk menjadi anggota PGRI.<sup>20</sup>

Meningkatnya anggota yang berafiliasi ke PKI membuat golongan anti PKI merasa risau, sehingga dengan melihat keadaan ini para guru yang anti PKI membuat organisasi non PGRI seperti Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGANU), Ikatan Guru Muhammadiyah (IGM), Persatuan Guru Kristen (PERGUKRI) demi keluar dari pengaruh komunisme.<sup>21</sup> Pada Kongres PGRI VIII yang diadakan di Bandung pada bulan Oktober 1956 PKI mulai bertindak.

Suasana Kkngres yang awalnya lancar dan aman menjadi ricuh ketika pemilihan ketua umum PB PGRI.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan terjadi kecurangan

<sup>17</sup> PGRI., *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>18</sup> Soebandri merupakan tokoh PKI Jawa Timur yang terpilih sebagai komisariat Jawa Timur pada Kongres PGRI V.

<sup>19</sup> Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., *op. cit.*, hlm. 85.

<sup>20</sup> Rusli Yunus, M. Rindorindo dkk, *op. cit.*, hlm. 103

<sup>21</sup> PGRI., *op.cit.*, hlm. 89.

<sup>22</sup> Rusli Yunus, M. *op.cit.*, hlm. 76.

dalam pemilihan, pihak Soebandri ternyata menambah jumlah kartu suara (kartu palsu) yang digunakan supaya M.E. Subiadinata tidak terpilih menjadi ketua umum. Diketahui bahwa dalang sebenarnya dibalik pemalsuan kartu suara adalah Hermanoe Adi yang merupakan tokoh PKI Jawa Timur dan masih menjabat sebagai ketua II PB PGRI. Hal ini membuat pemilihan harus diulang dan Hermanoe Adi dicopot jabatannya sebagai ketua II PB PGRI digantikan oleh M. Hoesein.<sup>23</sup> Pasca Kongres VIII PGRI pengaruh komunisme semakin banyak dalam organisasi.<sup>24</sup> Terutama di daerah PGRI cabang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang hampir keseluruhan dikuasai oleh PKI.

Kongres selanjutnya diadakan di Surabaya pada tanggal 31 Oktober hingga 4 November 1959.<sup>25</sup> Dalam Kongres IX PGRI kelompok PKI berhasil memenangkan suara tentang dasar PGRI, yang awalnya berdasarkan Pancasila diganti dengan dasar Manipol (Manifestasi Politik) dengan pemungutan suara sebesar 60% menyatakan setuju dan 40% menyatakan tidak setuju. Manipol sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban Presiden atas dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang dijadikan sebagai haluan Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup> Lima poin inti sari dari Manipol/USDEK adalah Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,

Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

Beberapa bulan pasca Kongres IX diadakan, PGRI mengalami masalah mengenai pengumpulan dana. Cabang-cabang PGRI yang berada di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebagian besar berafiliasi ke PKI tidak melakukan iuran rutin. Hal ini mengakibatkan PGRI mengalami kekurangan dana terutama untuk jalannya kegiatan PGRI ke depannya. Hal ini juga menghambat konsolidasi PB PGRI ke cabang-cabang yang berada di daerah-daerah.<sup>28</sup>

Suasana dalam tubuh PGRI memuncak setelah PB PGRI ikut serta dalam musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional yang diadakan pada 17 Juli 1963 di Jakarta.<sup>29</sup> Musyawarah ini diadakan oleh 5 partai politik dengan 40 ormasnya sebagai tanggapan terhadap “seminar pendidikan mengabdikan parpol” yang diadakan pada bulan Februari 1963 di Jakarta oleh Lembaga Pendidikan Nasional yang merupakan lembaga bentukan PKI dan kawan-kawannya. Permasalahan ini membuat jelas status keanggotaan PGRI, mana yang memihak musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan siapa yang memihak seminar pendidikan mengabdikan pada manipol.<sup>30</sup> Disini mulai terlihat jelas konsep mana kawan dan mana lawan. Kawan jelas merupakan anggota-anggota PGRI yang anti terhadap PKI, dan lawan

<sup>23</sup> Yunus, *op.cit.*, hlm. 87

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>26</sup> Lembaga Pendidikan Nasional, *Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Nasional, 1963), hlm. 13.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>28</sup> Yunus, *op.cit.*, hlm. 63

<sup>29</sup> Lembaga Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>30</sup> “Pantjasila dipantjarkan kedalam Manipol/Usdek”, *Waspada*, 2 Juni 1964

disini merupakan anggota PGRI yang pro terhadap PKI. hal ini memicu pergerakan dari beberapa tokoh PKI, yaitu Moejono dan Ikhwani yang secara terang-terangan mengajukan nota pengunduran diri setelah PGRI ikut serta dalam Musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional.

Setelah kejadian tersebut, kelompok Soebandri, Ikhwani, dan Moejono secara cepat mengadakan rapat pada tanggal 7 Juni 1964 yang berisi mengenai pembentukan organisasi tandingan PGRI bagi anggota-anggota yang berpaham komunis. Hal ini dilakukan tergesa-gesa dikarenakan apabila terlambat, maka Soebandri dkk tidak dapat menggunakan dalih nonvaksentral sebagai senjata propagandanya.<sup>31</sup> Vaksentral berarti organisasi yang terdapat induk organisasi (SOKSI merupakan induk organisasi PGRI), sedangkan nonvaksentral berarti organisasi yang berdiri sendiri.

Pada malam berikutnya, pihak Soebandri berencana menyatakan PB PGRI Nonvaksentral sebagai tandingan dari PB PGRI yang anti PKI atau disebut PGRI Kongres.<sup>32</sup> Perpecahan dua kubu organisasi PGRI menjadi PGRI Nonvaksentral yang pro PKI dengan PGRI Kongres yang Pancasilais disayangkan Rukun Kerja Sama (RKS).<sup>33</sup> RKS menyambut baik pendirian PGRI Nonvaksentral karena dianggap sesuai dengan jalan revolusi pendidikan yang diperlukan. Di sisi lain RKS merasa

kecewa terhadap tindakan M.E. Subiadinata yang dianggap tidak mematuhi hasil Kongres PGRI dan berusaha menentang Pancasila yang secara jelas telah disetujui oleh presiden.

Sejak terpecah menjadi PB PGRI Nonvaksentral, setiap daerah yang mendukung pendirian organisasi ini mulai mendirikan kantor cabang, seperti di Jawa Barat yang akan mendirikan kantor cabang PB PGRI Nonvaksentral di daerah Ciamis, Sumedang, Sukabumi, Garut, Karesidenan Cirebon dan Cianjur.<sup>34</sup> Perpecahan ini membuat beberapa kalangan guru bingung dalam memilih ideologi yang akan di dukung. Langkah PB PGRI Nonvaksentral untuk memperkokoh keberadaan dan posisinya dalam tubuh PGRI selain dilakukan dengan cara mengumpulkan dukungan dari berbagai daerah yang pro terhadap PGRI Nonvaksentral, juga mencari dukungan dari para pejabat pemerintahan. PB PGRI Nonvaksentral menemui menteri Departemen P & K, Dr. Prijono untuk menjabarkan rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh PGRI Nonvaksentral.<sup>35</sup> Di akhir pertemuan ini, PB PGRI Nonvaksentral menyatakan tidak lagi mengakui PB PGRI yang berada di bawah kepemimpinan M.E. Subiadinata.

Langkah yang diambil oleh PGRI Nonvaksentral adalah berusaha mengubah dasar dan isi moral pendidikan nasional dari Pancasila menjadi Panca

---

<sup>31</sup> Yunus, *op. cit.*, hlm. 71

<sup>32</sup> PB PGRI Nonvaksentral merupakan PGRI pimpinan Soebandri yang berafiliasi ke PKI, sedangkan PB PGRI Kongres merupakan PGRI vaksentral yang dipimpin oleh M.E. Subiadinata yang berlandaskan Pancasila. lihat Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., *op.cit.*, hlm. 74.

<sup>33</sup> RKS sendiri merupakan organisasi bawah yang dibuat oleh PB PGRI pusat yang berfokus pada perbaikan nasib pegawai negeri. Lihat PGRI., *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 90



Cinta atau Panca Tinggi.<sup>36</sup> Hal ini menjadi polemik di banyak kalangan pendidik terutama para guru yang masih memegang teguh kepada Pancasila. PGRI seluruh Kalimantan menolak untuk menerima Panca Cinta dan segala usaha memasukkan Panca Cinta ke dalam sistem pendidikan Pancawardhana. PGRI seluruh Kalimantan hanya akan mengakui dan mengamalkan Pancawardhana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai dari Panca Cinta sesuai dengan intruksi Menteri P & K No. 2 tanggal 17 Agustus 1962.<sup>37</sup>

Perdebatan mengenai dasar dan isi moral pendidikan nasional tidak mendapatkan kata sepakat dalam rapat. PGRI Kongres yang teguh kepada pendidikan Pancasila menolak Panca Cinta karena dianggap bertentangan dengan falsafah Pancasila. Untuk memperoleh dukungan dalam penolakan ini, PGRI Kongres melakukan reorganisasi di tubuh PGRI daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan basis PKI terbanyak. Ternyata tidak semua anggota PGRI yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung system Panca Cinta, hal ini digunakan oleh PGRI Kongres untuk menyingkirkan kaum reaksioner yang mendukung nilai Panca Cinta dengan reorganisasi tersebut. Reorganisasi tersebut dipelopori oleh guru-guru yang berada di daerah Tulungagung, yang merambah ke daerah Surabaya, Nganjuk, hingga ke Malang.<sup>38</sup> Selain itu untuk Yogyakarta sendiri juga melakukan reorganisasi untuk menyingkirkan

anggota-anggota yang mendukung nilai Panca Cinta.

Polemik yang terjadi semakin meruncing ketika diadakan rapat dinas tanggal 23 Juli 1964 menteri P & K, Dr. Prijono memancing kembali permasalahan mengenai perubahan dasar pendidikan nasional. Perubahan dasar pendidikan yang tidak kunjung mencapai kesepakatan karena beberapa menteri P & K masih mendukung Pancasila membuat pihak Nonvaksentral bertindak kembali dengan cara mengusulkan reorganisasi departemen P & K kepada Presiden. Hal ini ditanggapi oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 187/1964 dan No. 188/1964 pada tanggal 4 Agustus 1964 tentang reorganisasi departemen P & K yang mengubah jumlah pembantu menteri P & K dari 3 menjadi 2 orang.<sup>39</sup>

Kebanyakan pejabat di lingkungan Departemen P & K merasa gelisah terhadap keputusan tersebut karena dirasa bahwa tidak ada jaminan hukum yang jelas bagi pegawai dan karier mereka. Hal ini membuat 27 pegawai tinggi Departemen P & K mengirim surat kepada menteri Dr. Prijono dengan maksud untuk menjernihkan kembali suasana yang telah memanas di Departemen P & K. namun hal ini justru ditanggapi dengan hal yang tak terduga, 27 pengirim surat diberhentikan secara sepihak dengan alasan atas permintaan sendiri.<sup>40</sup> Salah satu pegawai yang dipecat dari adalah M.E. Subiadinata yang merupakan Ketua Umum PB PGRI Kongres. Dua puluh

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>37</sup> "PGRI Seluruh Kalimantan Tolak Pantjatjinta", *Merdeka*, 4 Juli 1964.

<sup>38</sup> "Menuju Masyarakat Sosialis Indonesia Berdasarkan Pantjasila Bukan

Berdasarkan Pantjatjinta", *Duta Masyarakat*, 5 Juli 1964.

<sup>39</sup> Rusli Yunus, M. *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>40</sup> "28 Orang Petugas PDK Minta Dinon Aktipkan", *Merdeka*, 24 Agustus 1964.

tujuh pejabat tinggi yang dipecat tidak putus asa dan terus berusaha untuk mencari keadilan, dari 24 pejabat yang dipecat diantaranya ditampung oleh markas besar TNI Angkatan Darat yang saat itu merupakan kelompok yang anti terhadap PKI. Untuk sementara nasib mereka diurus oleh Letnal Kolonel Amir Murtono, S.H. yang kelak akan menjadi ketua umum GOLKAR setelah terbentuk. Sementara itu tiga orang pejabat tinggi lainnya diangkat oleh menteri dalam negeri, dua orang diangkat sebagai pembantu khusus menteri dan satu orang lagi sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) pusat.

### C. Perlawanan PGRI Kongres Terhadap PGRI Nonvaksentral

Persatuan Guru Republik Indonesia Nonvaksentral yang mendapat dukungan dari pemerintah terutama kementerian P & K dan Presiden Soekarno yang berafiliasi ke PKI membuat PGRI Kongres (Vaksentral) mencari perlindungan ke TNI untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya. PGRI Kongres mencari dukungan ke tangan tentara dikarenakan TNI merupakan kelompok yang anti terhadap PKI. Untuk mencari kekuatan melawan PGRI Nonvaksentral, PGRI Kongres bergabung dengan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR) yang basis kekuatannya berasal dari militer TNI.<sup>41</sup>

Sekber GOLKAR merupakan organisasi anti PKI yang berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh 35 organisasi golongan karya non afiliasi politik. Ketua umum pertama Sekber Golkar Djuhartono yang pernah menjabat

sebagai brigadir Jenderal di TNI. Masuknya PGRI Kongres ke dalam Sekber Golkar membuatnya mendapatkan kekuatan yang cukup besar untuk bertahan dalam persaingan terhadap PGRI Nonvaksentral. Pertikaian antara PGRI Kongres di bawah kepemimpinan M.E. Subiadinata melawan PGRI Nonvaksentral yang dipimpin oleh Soebandri memuncak pasca terjadinya tragedi Gerakan 30 September 1965. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dijadikan momentum bagi pihak-pihak yang pro terhadap Pancasila untuk membentuk wadah perjuangan baru dalam melawan PKI.

Rusli Yunus melihat kesempatan dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 di mana PKI merupakan pelaku utama dan menjadi musuh hampir bagi semua kalangan, menganggap hal ini akan mempermudah menyingkirkan guru-guru yang berafiliasi ke PKI yang tergabung dalam PGRI Nonvaksentral dengan membuat wadah baru bagi guru untuk berjuang melawan PKI atas nama keadilan dengan nama Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI).

Kesatuan Aksi Guru Indonesia beranggotakan guru-guru dari organisasi Perserikatan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Ikatan Guru Muhammadiyah (IGM), Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Marhaenis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Indonesia, dan Persatuan Guru PERTI.<sup>42</sup> KAGI sendiri memiliki tiga tugas utama, pertama membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusan-urusan PKI, Kedua, menyatukan guru di dalam satu wadah organisasi guru yaitu

Sekretariat Bersama Golongan Karya Front Nasional.

<sup>41</sup> Arsip, Surat Keanggotaan, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI kepada Ketua Umum DPP PNI: Surat Tanggal 24 april 1965 tentang status PGRI dalam

<sup>42</sup> PGRI, *op. cit.*, hlm. 185-186.

PGRI, Ketiga, memperjuangkan PGRI sebagai organisasi guru unitaristik, independen, dan non partai politik.<sup>43</sup>

Target utama KAGI adalah untuk menyingkirkan PGRI Nonvaksentral dan untuk melaksanakan tugas tersebut, KAGI harus memperkokoh barisan pendukungnya dan menyingkirkan para pendukung PGRI Nonvaksentral.<sup>44</sup> Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang bertujuan menyingkirkan PKI dari tanah air Indonesia dijadikan tumpuan oleh KAGI untuk menyingkirkan PGRI Nonvaksentral. KAGI bersama dengan KAMI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Perusahaan Nasional Indonesia (KAPNI), dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) melakukan demonstrasi pada 10 Januari 1966 untuk mengajukan tuntutan kepada Presiden Soekarno mengenai pembubaran PKI.

Menandai sebuah era perjuangan baru, Dr. A.H. Nasution yang merupakan salah satu tokoh selamat dari peristiwa G 30 S PKI mengusulkan penggunaan nama Angkatan 66 kepada presidium KAGI untuk menandakan suatu kebangkitan nasional yang baru. Usul tersebut diterima oleh kelompok KAGI dan secara resmi menggunakan nama Angkatan 66 sebagai organisasi gabungan KAGI, KAMI, KASI, KAPNI, KABI, KAWI, dan KAPI. Angkatan 66 Mendesak Presiden Soekarno untuk segera melakukan tindakan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI. Menghadapi tuntutan tersebut, salah satu tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah memberikan surat perintah sebelas Maret atau yang biasa disebut supersemar kepada letnan

Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Surat perintah tersebut berisi tentang intruksi Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara. Alih-alih menjalankan perintah yang sesuai tugasnya, Soeharto justru menggunakan supersemar untuk legitimasi dalam pengambilan kepemimpinan negara dari tangan Soekarno. Salah satu hal yang dilakukan Soeharto adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.1/3/1966 tentang pembubaran dan penumpasan PKI dari pusat hingga daerah beserta simpatisannya. Dikeluarkannya Kepres No. 1/3/1966 tentang penumpasan PKI beserta simpatisannya oleh Soeharto membuat PGRI Nonvaksentral semakin terpojok. Adanya berita tentang diadakannya penangkapan-penangkapan oleh tentara terhadap anggota dan simpatisan PKI membuat para anggota PGRI Nonvaksentral semakin cemas.

Kecemasan pun semakin menyebar, bukan hanya di kalangan anggota anggota PGRI Nonvaksentral saja melainkan di seluruh kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan bahwa seseorang bukanlah PKI, maka orang tersebut diharuskan membunuh orang lain yang terindikasi PKI. Muncullah stigma baru di kalangan masyarakat, di mana mereka lebih baik membunuh untuk bertahan hidup daripada mati di tangan orang lain. Stigma tersebut menimbulkan banyak masyarakat yang membunuh tetangganya sendiri hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 191

<sup>44</sup> Pendukung PGRI Nonvaksentral yang dimaksud disini adalah

pemerintahan Orde Lama dan Presiden Soekarno yang dianggap sebagai dalang PKI di Indonesia.

simpatisan PKI.<sup>45</sup> Mental “saya lebih baik membunuh daripada dibunuh” tertanam dalam benak masyarakat yang ingin mempertahankan hidupnya, memilih jalan membunuh saudara setanahairnya yang dahulu berjuang bersama dalam mengusir penjajah. Untuk mempercepat pembersihan PGRI Nonvaksentral dan komunisme dari tanah air Indonesia, TNI terus memperluas stigma tersebut, bahkan TNI juga sempat membuat slogan yang berbunyi “sebaiknya menangkap sebanyak mungkin orang lebih baik daripada sama sekali tidak”.<sup>46</sup>

Pembunuhan para anggota PGRI Nonvaksentral sudah berpola dan terstruktur secara sistematis. Pertama pembentukan organisasi masa (dalam hal ini KAGI yang merupakan organisasi untuk melawan PKI), melakukan gerakan sosial anti PKI, meruntuhkan kekuatan penyokong utama yang melindungi PGRI Nonvaksentral, hingga akhirnya pembunuhan massal para anggota PGRI Nonvaksentral. Pembersihan dilakukan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diketuai oleh Sarwo Edhi terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober 1966, pada bulan November merambah ke Jawa Timur, dan pada Bulan Desember mencapai daerah Bali.<sup>47</sup>

Pembersihan yang terjadi di Jawa Tengah dilakukan langsung oleh RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edhi yang diutus langsung oleh Soeharto pada

pertengahan bulan Oktober. Beberapa wilayah Jawa Tengah yang terkena dampak pembantaian paling ganas oleh RKPAD adalah Purwodadi, Boyolali, Klaten, dan Solo. Di daerah Purwodadi bahkan terdapat 14 penahanan sementara sebelum akhirnya para tertuduh dieksekusi atau dibuang. Daerah Boyolali menjadi salah satu tempat pembantaian yang ganas, sekitar 250 orang dibunuh secara massal. Bahkan Beberapa anggota PGRI Nonvaksentral yang merupakan guru SD menjadi korban dengan kekejaman ini.

Daerah Jawa timur juga tidak luput dari pembantaian yang terjadi. Pembantaian yang terjadi di Jawa Timur kebanyakan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Anzor (GP Anzor).<sup>48</sup> GP Anzor berani dalam melakukan pembunuhan didampingi dan dilindungi oleh angkatan bersenjata Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yon Zipur 5/ABW).<sup>49</sup> Selain di Jawa, pembersihan juga dilakukan di Bali oleh RKAPD yang dipimpin oleh Sarwo Edhi. Pasukan RKAPD yang dipimpin Sarwo Edhi tiba di Bali akhir bulan Desember. Seperti di Jawa, dengan dalih pembersihan Komunisme RKPAD melakukan pembunuhan masal dengan cara mengumpulkan orang-orang yang terduga sebagai simpatisan PKI. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam sel yang sempit untuk memastikan mereka tidak

---

<sup>45</sup> Sudjono, Wawancara di Jakarta Timur, 14 Agustus 2019.

<sup>46</sup> PGRI, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 173

<sup>48</sup> GP ansor merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia. Organisasi ini

didirikan pada tanggal 24 April 1934 di Banyuwangi. Lihat *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>49</sup> Zeni Tempur 5 merupakan satu kecabangan dalam TNI Angkatan Darat yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi teknis militer baik di daerah pertempuran maupun di daerah pangkalan. Lihat *Ibid.*, hlm. 172

bisa kabur.<sup>50</sup> Beberapa diantara mereka bahkan dibunuh dengan cara dipegang kepalanya kemudian disandarkan di batu untuk dipenggal menggunakan klewang.

Pembantaian yang terjadi membuat banyak anggota PGRI Nonvaksentral sering berpindah-pindah tempat demi menghindari penangkapan yang dilakukan oleh pihak militer.

#### D. KESIMPULAN

Persatuan Guru Republik Indonesia berdiri pada tanggal 25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Puteri (SGP) Surakarta. Akar pendirian PGRI sebenarnya sudah dapat dilihat lebih jauh lagi pada tahun 1912. Pada waktu itu persatuan guru pertama didirikan oleh Dwidjosewojo sebagai Pengurus Besar organisasi Budi Utomo untuk memberikan ruang perjuangan bagi para guru Hindia Belanda. Dwidjosewojo mendirikan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang beranggotakan Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik sekolah. PGHB didirikan karena terjadi kesenjangan gaji antara guru pribumi dengan guru berkebangsaan Eropa. Pada tahun 1932 PGHB memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Melalui PGI para guru mulai melakukan aksi pemrotesan terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan guru. Pengaruh yang paling terasa dari PGI adalah pengangkatan status guru-guru menjadi pegawai negeri pemerintahan.

Perjuangan guru yang sempat redup pada era Jepang dilanjutkan kembali oleh Rh Koesnan. Menyadari

peluang untuk menyalurkan perjuangan penyadaran nasional melalui sebuah wadah organisasi profesi baru, Rh Koesnan berinisiatif membuat sebuah organisasi untuk mempersatukan semua guru Indonesia tanpa memandang perbedaan latar belakang pendidikan ataupun agama sehingga tidak akan terulang kembali perpecahan yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda. Rencana tersebut berhasil direalisasikan melalui Kongres Pendidik Bangsa yang diadakan di Surakarta pada 25 November 1945 dan secara resmi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berdiri. Semenjak pendirian PGRI pada tahun 1945, PGRI rutin mengadakan kongres-kongres untuk memperjuangkan nasib para guru yang berada dibawah naungannya.

Perpecahan mulai terjadi ketika pada Kongres IX dibahas mengenai perubahan dasar PGRI. Terlihat jelas pihak yang membela PKI dan yang membela Pancasila dari jumlah suara yang didapatkan. Sebesar 60% suara setuju pengubahan dasar PGRI menjadi manipol (Manifestasi Politik) yang sebelumnya berdasarkan Pancasila. Suasana memanas ketika PB PGRI memutuskan ikut serta dalam musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar Pendidikan nasional pada 17 Juli 1963. Hal ini memicu pergerakan dari dua tokoh PKI, yaitu Moejono dan Ikhwani untuk mencegah PGRI kembali ke Pancasila. Moejono dan Ikhwani dibantu oleh Soebandri akhirnya mendirikan PGRI Nonvaksentral sebagai tandingan terhadap anggota PGRI yang pro Pancasila. Soebandri mengajak orang-orang PGRI yang pro PKI untuk ikut bergabung ke dalam PGRI Nonvaksentral untuk mengalahkan PGRI pusat (PGRI Kongres).

---

<sup>50</sup> Mangku, Wawancara di Banyuwangi, 29 Juni 2019.

Perbedaan paham antara Komunisme dan Pancasila membuat PGRI pecah menjadi dua organisasi. PGRI Nonvaksentral yang pro PKI dan berusaha mengubah dasar pendidikan nasional ke Panca Cinta, dan PGRI Kongres yang pro Pancasila yang tetap ingin Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional.

Perpecahan yang terjadi pada tahun 1964 lebih menguntungkan pihak PGRI Nonvaksentral. Hal ini dikarenakan PGRI Nonvaksentral mendapat dukungan dari pemerintah era Soekarno yang juga pro terhadap komunisme. PGRI Kongres yang merasa terancam dengan adanya PGRI Nonvaksentral yang didukung pemerintah kemudian mencari perlindungan ke ranah militer. Meletusnya peristiwa G 30 S PKI menjadi titik balik serangan PGRI Kongres terhadap PGRI Nonvaksentral.

Rusli Yunus yang merupakan salah satu anggota PB PGRI Kongres membentuk sebuah organisasi perjuangan guru untuk membantu KAMI dalam menyingkirkan PKI di Indonesia. Dengan dalih keadilan, KAGI berusaha menyingkirkan tokoh-tokoh pendukung PGRI Nonvaksentral yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa G 30 S PKI karena merupakan organisasi yang berpaham komunisme. Soeharto kemudian membentuk Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diketuai oleh Sarwo Edhi untuk melakukan pembersihan PGRI Nonvaksentral. RPKAD melakukan pembersihan para anggota PGRI Nonvaksentral di Jawa Tengah dan Bali. Jawa Timur kebanyakan dilakukan oleh organisasi pemuda setempat dibantu dengan kekuatan militer seperti Batalyon Zeni Tempur 5.

Kekuatan PGRI Nonvaksentral yang sudah melemah digunakan PGRI Kongres untuk menyatukan kembali para guru dalam satu wadah organisasi. Pada

Kongres PGRI XI tahun 1967 dinyatakan bahwa PGRI Nonvaksentral merupakan ormas terlarang, pembersihan cabang-cabang PGRI dari pengaruh PKI, menegaskan Pancasila sebagai dasar PGRI kembali.

## DAFTAR PUSTAKA:

### Arsip:

Surat Keanggotaan, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI kepada Ketua Umum DPP PNI: Surat Tanggal 24 april 1965 tentang status PGRI dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya Front Nasional.

### Buku:

Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., *Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSPPGRI), Jilid II, III, IV, V.* Semarang: IKIP PGRI, 2000.

Lembaga Pendidikan Nasional, *Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Nasional, 1963.

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, *Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Persatuan Guru Republik Indonesia., *Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI*, Jakarta : PGRI YPLP, 2008.

Rusli Yunus, M., Rindorindo dkk, *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres PGRI XIX di Semarang, 8-12 Juli 2003*, Jakarta: PB PGRI & Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003

Yunus, *PGRI dari masa ke masa*.  
Jakarta: PGRI YPLP. 2003.

**Majalah dan Koran:**

"28 Orang Petugas PDK Minta Dinon  
Aktipkan", *Merdeka*, 24 Agustus  
1964.

"Menuju Masyarakat Sosialis Indonesia  
Berdasarkan Pantjasila Bukan  
Berdasarkan Pantjatjinta" *Duta  
Masyarakat*, 5 Juli 1964.

"Pantjasila dipantjarkan kedalam  
Manipol/Usdek", *Waspada*, 2 Juni  
1964

"PGRI Seluruh Kalimantan Tolak  
Pantjatjinta", *Merdeka*, 4 juli 1964

**Skripsi:**

Budi Sanjaya, "Perserikatan Guru hindia  
Belanda", *Skripsi*, Yogyakarta:  
UGM, 1990

**Wawancara:**

Sudjono, Wawancara di Jakarta Timur,  
14 Agustus 2019.

Mangku, Wawancara di Banyuwangi, 29  
Juni 2019

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Pembimbing



Ririn Darini, M. Hum.  
NIP. 19741118 199903 2 001

Reviewer



Danar Widiyanta, M. Hum.  
NIP. 19681010 199403 1 001